

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Konstelasi politik kawasan Timur Tengah di satu sisi seperti Tunisia dan Mesir, Libya sedang berusaha menata kembali berbagai aspek sosial kehidupan warganya, akan tetapi revolusi di Suriah memang masih dalam rentetan kejadian yang menimpa kawasan Timur Tengah tersebut. Berbeda dengan Tunisia, Mesir, dan juga Libya ketiga negara itu bisa dikatakan 'selesai' masalahnya, sementara Suriah justru masih bertahan dengan konfliknya yang cukup alot.

Sejak terjadinya gelombang revolusi di Arab yang diawali dari Tunisia, revolusi mencapai Suriah terjadi pada bulan Maret 2011. Pemberontakan yang dilakukan pihak oposisi di negeri tersebut terjadi karena ketidakpuasan terhadap rezim pemerintahan Suriah di mana Bashar al Assad selaku presidennya. Konflik yang sudah berjalan setahun menuntut Presiden Suriah Bashar Al-Assad turun dari kursi kekuasaannya itu telah menimbulkan cara-cara represif sang presiden dalam mempertahankan kekuasaannya.

Situasi tidak menentu di Suriah pun telah mengundang pihak-pihak asing masuk ke dalam arena konflik. Di satu pihak, Amerika, negara-negara Liga Arab dan Uni Eropa mendukung oposisi, sementara di sisi lain Rusia, Cina dan Iran adalah pendukung Presiden Bashar Al-Assad. Yang amat disayangkan, Dewan Keamanan (DK) PBB yang diharapkan dapat

menyelesaikan kemelut di negeri itu seperti kehilangan fungsinya. DK PBB gagal membuat keputusan dalam sidangnya pada tanggal 4 Februari 2012 karena di Veto Rusia dan Cina.<sup>1</sup>

Revolusi terhadap pemerintahan Bashar al Assaad oleh pihak oposisi yang berujung pada konflik berkepanjangan itu telah menelan banyak korban jiwa. Terhitung sampai 13 bulan berlangsungnya konflik revolusi, PBB melaporkan lebih dari 9.000 orang tewas dan memperkirakan sekitar 26.000 warga Suriah mengungsi melalui perbatasan ke Lebanon.<sup>2</sup> Presiden Majelis Umum PBB Nassir Abdulazziz al-Nasser mengatakan sebagian korban tewas adalah anak-anak dan kaum perempuan. Kondisi di Suriah tersebut juga diperparah dengan aksi rentetan teror bom dari waktu ke waktu di beberapa kota di Suriah, seperti Damaskus, Homs, Idlib dan kota lainnya, sehingga membuat kondisi kota menjadi mencekam. Para pengamat mengatakan kemungkinan besar jatuhnya korban jiwa akan terus bertambah mengingat konflik masih belum mereda.

Oleh PBB gencatan senjata antara kedua belah pihak yang bertikai sebenarnya sudah diberlakukan sejak 12 April 2012, namun aksi kekerasan juga tetap terjadi bahkan ketika tim pemantau PBB masuk ke Suriah.<sup>3</sup> Seperti yang disampaikan Sekjen PBB Ban Ki-moon: "Setiap hari kita melihat gambar-gambar yang mengerikan - pasukan menembaki pusat-pusat kota,

<sup>1</sup> Bambang Unjianto <http://www.suaramerdeka.com/Konflik-Suriah-Makin-Tak-Menentu>. Diakses 2 Mei 2012

<sup>2</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120510\\_syria.html](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120510_syria.html). Diunduh 2 Mei 2012.

<sup>3</sup> Lingga Permesti. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/04/24/m2zjzv-sehari-60-orang-tewas-di-suriah>. Diakses 2 Mei 2012

warga sipil yang tidak bersalah tewas, bahkan anak-anak. Pasukan keamanan menahan dan menyiksa warga dengan kejam."<sup>4</sup> Tak heran jika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mencap Pimpinan Suriah Bashar al-Assad itu sebagai sebagai seorang penjahat perang.<sup>5</sup>

Meningkatnya konflik serta banyak jatuhnya korban jiwa dari warga sipil di Suriah menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Suriah merupakan salah satu negara di mana banyak warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di sana. Tercatat total jumlah WNI di Suriah sekitar 12.500 orang.<sup>6</sup> Selain sebagai mahasiswa, sebagian besar di antara mereka bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Konflik di Suriah antara pihak oposisi dengan rezim yang sudah setahun lamanya, menyebabkan Indonesia segera mengambil tindakan untuk mengevakuasi WNI, terutama terhadap WNI yang tinggal di daerah rawan konflik.

Berkaitan dengan konflik yang terus memanas di Suriah, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pun menyerukan agar dunia internasional bersikap satu suara menyikapi kekerasan di Suriah. "Kami meyakini sudah saatnya sekarang semua negara -- termasuk yang menolak upaya kami -- untuk berdiri di belakang upaya kemanusiaan dan pendekatan politik yang dilakukan Liga Arab".<sup>7</sup> Sementara Sekjen PBB Ban Ki-moon bernada sama, menegaskan

---

<sup>4</sup> [http://Antara.com/Ban:Berpacu Melawan Waktu Untuk Hentikan Perang di Suriah](http://Antara.com/Ban:Berpacu%20Melawan%20Waktu%20Untuk%20Hentikan%20Perang%20di%20Suriah)

<sup>5</sup> Copcit, *bc.co.uk*

<sup>6</sup> <http://kbr68h.com/berita/nasional/19679-kbri-di-suriah-siap-tampung-wni-dari-area-berbahaya.html>. diakses 3 Mei 2012

<sup>7</sup> Ibid.

permasalahan Suriah adalah menjadi tugas dan tanggung jawab atas nama sejarah dan kemanusiaan. "Kondisi yang terjadi di Suriah sudah tidak bisa ditoleransi dan sangat berbahaya. Krisis yang bisa berpotensi mengganggu keamanan kawasan dan dunia."<sup>8</sup>

Dewan HAM PBB, UNHRC, memperkeras sikap terhadap Suriah dengan mengeluarkan kecaman tajam terhadap kekerasan yang meningkat dan menyerukan perluasan penyelidikan atas dugaan pelanggaran pemerintah Suriah dalam kerusuhan satu tahun terakhir. Konflik yang terjadi terus menerus dan ketidakpastian titik temu, tak heran, banyak pula kecaman dilontarkan dari masrakat internasional untuk memberlakukan sanksi yang ketat terhadap Suriah, terutama kecaman dari Negara-negara Barat, Uni Eropa dan Liga Arab yang pro terhadap pihak oposisi.

Berbagai sanksi dan ancaman pun akhirnya ditujukan secara bertubi-tubi kepada Suriah. Perancis mengancam akan mendesak 47 negara anggota UNHRC bersiap untuk mengajukan tuntutan atas Suriah ke Mahkamah Internasional di Den Haag.<sup>9</sup> Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang bekerjasama membantu Suriah. Liga Arab telah menerapkan sanksi berupa menghentikan transaksi dengan bank sentral Suriah, menghentikan pendanaan dari pemerintah Arab untuk proyek di Suriah,

---

<sup>8</sup> Pidato Sekjen PBB Ban Ki-moon Saat menghadiri forum Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) di Jakarta, Rabu (21/3), Replubika.com. <http://id.berita.yahoo.com/butuh-kerjasama-untuk-carikan-solusi-suriah-140954438.html> di download pada tanggal 2 Mei 2012.

<sup>9</sup> Ibid. *bbc.co.uk*

larangan perjalanan untuk pejabat tinggi Suriah, pembekuan aset terkait dengan pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Uni Eropa juga sepakat untuk memberi sanksi lebih keras terhadap rezim Suriah yang berupa melarang ekspor barang mewah dan membatasi penjualan barang. Sanksi-sanksi atau kecaman tersebut adalah upaya untuk menekan rezim pemerintahan agar Presiden Suriah menghentikan kekerasan dan mundur dari kursi kekuasaannya.

Bagi rezim pemerintahan Suriah yang telah mendapatkan dukungan kuat dari negara-negara yang membelanya seperti Rusia, China dan Iran. Suriah punya argumentasi sendiri mengenai kejadian berkaitan aksi terror bom yang terjadi di beberapa kota di Suriah. Pihak rezim menyangkal tuduhan dari pihak oposisi yang menyatakan bahwa yang melakukan peledakan bom dari waktu ke waktu dilakukan oleh pihaknya. Duta besar Suriah di PBB justru menuding sejumlah negara Arab membantu pasokan senjata kepada kelompok pemberontak. Karena itu, Suriah minta PBB turun tangan untuk menghentikan pasokan senjata dari negara-negara Arab kepada kelompok pemberontak. Suriah juga menuding bahwa aksi teror bom yang terjadi di beberapa kota di Suriah adalah ulah teroris di mana campur tangan Amerika terlibat di situ. Bahkan, Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari mengatakan sejumlah anggota DK PBB mencoba untuk mengarahkan dunia internasional kepada pengertian yang salah tentang peristiwa yang terjadi di Suriah.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120528\\_suriahupdate.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120528_suriahupdate.shtml).

Di Turki sekitar 10.000 aktivis rakyat dan sipil Turki melakukan unjuk rasa di Antioch untuk menunjukkan solidaritas terhadap Suriah dan dukungan kepada Presiden Bashar Al-Assad.<sup>11</sup> Para pengunjuk rasa menyatakan penolakan intervensi asing di Suriah. Selama ini pula Suriah mendapat dukungan dari China, Rusia dan Iran. Cina dan Rusia adalah negara yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut Presiden Bashar al Assaad mundur. Di samping itu Rusia adalah negara di mana Suriah banyak mendapatkan perlengkapan persenjataannya dari Rusia, dan China pun adalah mitra kerjasama Suriah yang menjanjikan dalam bidang perdagangan. Sementara Iran adalah negara yang secara politik sering “bertikai” dengan Amerika dan Negara-negara Uni Eropa karena isu kepemilikan nuklir Iran, bahkan oleh Amerika, Negara Iran dicap kedalam kelompok poros setan.

Dalam konteks Indonesia, sikap Indonesia cukup penting untuk turut serta menciptakan keamanan internasional. Menentukan sikap khususnya mengenai pecahnya revolusi yang berujung pada konflik berkepanjangan di Suriah hingga mengakibatkan banyak jatuhnya korban jiwa, mengingat Indonesia mempunyai visi menciptakan ketertiban dunia sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Di samping itu hubungan bilateral antara Indonesia dan Suriah yang selama ini berjalan dengan baik agar tetap terjaga. Suriah adalah negara yang memiliki posisi penting dan strategis bagi Indonesia, baik dalam kerangka pengembangan hubungan dan kerjasama bilateral, upaya proses perdamaian regional, serta dalam konteks pelaksanaan hubungan dan kerjasama internasional. Suriah merupakan mitra kerjasama

---

<sup>11</sup>ibid

Indonesia dalam berbagai bidang. Indonesia dan Suriah juga sama-sama negara yang satu suara menyangkut situasi di Timur Tengah terutama menyangkut kebiadaban zionisme terhadap rakyat Palestina, situasi di Lebanon, konflik di Iran.

Hubungan bilateral Indonesia Suriah sudah terjalin sejak lama. Suriah termasuk negara yang mempunyai jasa bagi kemerdekaan Indonesia pada transisi era kolonial Belanda. Suriah mempunyai andil besar dalam memperjuangkan Indonesia agar menjadi negara yang merdeka secara penuh. Di tahun 1947, Suriah adalah wakil tetap di PBB yang menghendaki agar masalah Indonesia dibawa pada forum DK PBB yang akhirnya berhasil mengeluarkan resolusi dalam bentuk instruksi agar segera dihentikan agresi militer Belanda dan harus dicapai penyelesaian damai melalui perundingan.<sup>12</sup> Historisitas tersebut merupakan landasan kuat bagi hubungan bilateral Indonesia-Suriah. Suriah pun merupakan salah satu Negara Arab yang pertama memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Terhitung terjalinnya hubungan kedua negara itu sampai pada tahun 2012 telah menginjak usia yang ke - 65 tahun.

Hubungan RI-Suriah baik pada tataran regional maupun internasional, terjalin erat melalui berbagai forum kerjasama internasional, seperti melalui forum OKI, GNB dan PBB. Di mana kedua negara mengupayakan untuk saling memberikan dukungan bagi pencalonan masing-masing pada keanggotaan badan internasional. Suriah selalu memberikan dukungan atas

---

<sup>12</sup> <http://www.kompas.com.RI-Suriah>, *Akar Historis Sejak 1947*. Diakses 26 mei 2012.

pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Dewan HAM, ICAO, IMO, dan External Auditor WHO.<sup>13</sup>

Kedekatan secara politis kedua Negara itu, membantu memberikan ruang gerak dan iklim yang kondusif bagi pengembangan kerjasama ekonomi RI-Suriah. Di sektor perdagangan, hubungan kedua Negara mencatat perkembangan berarti. Nilai kerja sama ekonomi Indonesia-Suriah periode 1990-2010 yang mencapai US\$ 335 juta dinilai masih minim. Menurut data Kementerian Perdagangan, total perdagangan Indonesia-Suriah pada 2009 baru mencapai 91,5 juta dolar AS sementara pada Januari-Juli 2010 senilai 40,8 juta dolar AS. Neraca perdagangan Indonesia dengan negara itu selalu surplus sejak 2005 sampai semester pertama 2010. Neraca perdagangan dengan Suriah pada 2009 surplus 88,5 juta dolar AS dan selama Januari-Juli 2010 surplus 31,2 juta dolar AS. Tahun 2009 nilai total perdagangan sebesar 91 juta dolar AS, ekspor kita 90 juta dolar AS dan impor dari sana cuma satu juta dolar AS saja.<sup>14</sup>

Indonesia merupakan negara yang berpeluang besar dalam mengeksport berbagai komoditasnya ke Suriah atau pun negara-negara Timur Tengah, produk Indonesia yang kompetitif selama ini telah mampu menjangkau dan memasuki pasar Suriah antara lain produk kertas, komponen kendaraan (ban dan velg kendaraan), barang elektronik dan peralatan listrik, mie instan, serta produk kayu, tekstil, kelapa sawit. Sejumlah produk andalan

---

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> [Http://www.Kemlu.com.hubungan\\_bilateral\\_Indonesia-suriah.html](http://www.Kemlu.com.hubungan_bilateral_Indonesia-suriah.html). diakses 24 April 2012.



Indonesia penting lainnya kini juga mulai memasuki pasar Suriah, antara lain produk bahan bangunan, peralatan rumah tangga serta produk-produk *home furniture*. Sementara ekspor Suriah ke Indonesia terdiri atas fosfat, minyak zaitun, kapas dan buah-buahan.

Sanksi ekonomi AS yang dijatuhkan kepada Suriah sejak tahun 2005, justru membuka peluang pengembangan kerjasama perdagangan secara lebih luas. Hal ini karena para pengusaha dan dunia usaha Suriah berupaya memanfaatkan hubungan bisnis dan perdagangan dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia.<sup>15</sup>

Walaupun Suriah sedang mengalami gejolak revolusi yang terus berlanjut sejak tahun 2011 hingga 2012, namun Indonesia berusaha menjaga dan berharap agar hubungan dengan Suriah berjalan dengan baik. Dan Hal itu terlihat saat Indonesia menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Republik Arab Suriah, Abdullah Al-Dardari, pada tanggal 22 April 2012 di Kementerian Luar Negeri.<sup>16</sup> Pertemuan yang membahas terutama pada upaya peningkatan hubungan kerjasama di antara kedua negara khususnya ekonomi dan perdagangan. Wakil PM Suriah mengungkapkan keinginan negaranya untuk dapat bertukar pikiran dan memperoleh lebih banyak pengetahuan dari Indonesia termasuk mengenai langkah-langkah privatisasi BUMN yang dianggap berhasil dilakukan oleh Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Nata Legawa, menyampaikan harapan pertemuan itu akan menjadi

---

<sup>15</sup> Cop.cit. *RI-Suriah, Akar Historis*

<sup>16</sup> Copcit.bbc.uk

awal peningkatan kerjasama kedua negara yang lebih erat. Menlu juga mengundang Suriah untuk dapat menghadiri peringatan berdirinya Gerakan Non Blok (GNB) yang akan dilaksanakan di Bali.

Kunjungan tersebut merupakan rangkaian acara kunjungan Wakil PM Suriah ke Indonesia. Wakil PM Suriah juga melakukan kunjungan ke Bandung. Suriah akan melakukan kerjasama pendidikan dengan ITB. Saat melakukan kunjungan ke IPTN, Wakil PM Suriah mengungkapkan kekagumannya atas teknologi tinggi yang dimiliki IPTN dan direncanakan akan membeli beberapa unit helikopter dari IPTN.

Dari penerimaan yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Nata Legawa, terhadap kunjungan pemerintah Suriah ke Indonesia di bulan April tahun 2012, secara politis menandakan bahwa walaupun Negara Suriah sedang mengalami konflik berkepanjangan yang disebabkan pihak oposisi yang menginginkan rezim pemerintah Suriah segera lengser dari kekuasaannya, akan tetapi Indonesia berusaha menjaga hubungan dengan Negara Suriah tersebut supaya tetap berjalan dengan baik. Indonesia masih mau menerima kedatangan wakil PM Suriah dan mau bekerjasama. Dalam konteks kejadian revolusi yang berakibat konflik berkepanjangan yang sedang berlangsung di Suriah, selama revolusi pecah di Suriah antara pihak rezim Suriah dengan oposisi yang telah merenggut ribuan korban jiwa, Indonesia tidak menunjukkan keberpihakannya baik kepada pihak rezim pemerintahan Basyar Al-Assad selaku pemimpin Suriah maupun pada pihak

oposisi. Meskipun demikian Indonesia tetap mendukung warga Suriah yang menginginkan terjadinya revolusi demi terciptanya Suriah yang lebih baik.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, rumusan permasalahan yang ingin dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu: *Bagaimana sikap Indonesia terhadap revolusi di Suriah 2011-2012?*

## **C. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasarkan konsep atau definisi. Teori memiliki fungsi signifikan dalam suatu penelitian dikarenakan dengan unsur inilah peneliti akan coba menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi pusat perhatian. Menurut Masri Singarimbun, teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruk definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu hubungan antar konsep. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan variabel lainnya, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.<sup>17</sup>

Dalam sebuah penelitian Teori menurut W. Gulo memiliki beberapa fungsi. *Fungsi pertama* adalah eksplanatif, atau menjelaskan. Suatu teori harus mampu menjelaskan hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang terdapat dalam pengalaman empiris. *Fungsi kedua*, yaitu fungsi prediktif atau fungsi peramalan atau perkiraan. *Fungsi ketiga*

---

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3S. 1989. Hal. 37

adalah fungsi kontrol. Teori tidak hanya menjelaskan dan memperkirakan, tetapi juga mampu mengendalikan peristiwa supaya tidak mengarah pada hal-hal negative.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan teoritik yang dipakai untuk menganalisis, menjelaskan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah di atas.

### 1. Teori Politik Luar Negeri

Untuk menganalisa dan menjelaskan pokok permasalahan di atas dapat menggunakan teori Politik Luar Negeri (*Foreign Pollicy*), Menurut Jack. C Plano dan Roy Olton Politik Luar Negeri adalah:<sup>19</sup>

*“Foreign policy is strategy or planned course of action developed by the decision makers of vis a vis other states or international entities, aimed as achieving specific goal defined intern of international interest”.*

“Strategi atau rangkaian kegiatan tindakan yang terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu Negara terhadap Negara lain atau terhadap entitas internasional yang ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang teridentifikasi bagi kepentingan nasional.”

---

<sup>18</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*. Jakarta . PT Grasindo, 2007. Hal. 4-5

<sup>19</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *The International Dictionary*, Rienert an Wistone inc USA 1969, terjemahan Wawan Juanda Abardin, hal 7.

Teori politik luar negeri adalah teori yang menjelaskan pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya.<sup>20</sup> Dalam hubungannya dengan negara lain, politik luar negeri berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang mengikuti serangkaian tindakan khusus. Analisa kebijakan luar negeri adalah usaha untuk mendapatkan penjelasan rasional mengapa suatu Negara berperilaku demikian. Dengan ringkasnya dinyatakan bagaimana menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambil kebijaksanaan, pemerintah dan mengelola sumberdaya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di lapangan internasional dengan hasil yang baik.

Sementara penelitian politik luar negeri mencari jawaban atas “bagaimana” dan “mengapa” suatu rangkaian tindakan dilakukan. Politik internasional berkaitan dengan konsekuensi pertentangan politik luar negeri di lingkungan dunia yang kompetitif ini.<sup>21</sup> Politik Luar negeri digambarkan sebagai penghubung antara lingkungan domestic dan lingkungan eksternal suatu negara. Ia juga bisa digambarkan sebagai halaman yang menghubungkan dua rumah yang saling berhadapan, yaitu rumah yang dihuni oleh masyarakat domestik dan masyarakat negeri lain. Dan memang yang menghubungkan negara yang berdaulat adalah politik luar negeri. Maka dari itu, setiap pendekatan dalam pembahasan tentang politik luar negeri harus bisa

---

<sup>20</sup> Mohtar Masoe'd, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal 221.

<sup>21</sup> Padmo Wahjono dan Nazarudin Syamsudin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 399

menunjukkan metode untuk mengevaluasi hubungan itu. Pendekatan politik luar negeri mengacu pada konsep “kepentingan nasional”.<sup>22</sup>

Selama berlangsungnya konflik revolusi yang terjadi di Suriah yang dimulai sejak maret 2011, walaupun Suriah mendapat dukungan dari China, Rusia dan Iran, namun di sisi lain Suriah sering mendapat berbagai kecaman dari masyarakat internasional terutama Negara-negara Barat Amerika, Uni Eropa, Liga Arab bahkan dari “teman karibnya”, Turki. Dalam konteks politik luar negeri Indonesia terhadap berlangsungnya konflik revolusi di Suriah, Indonesia diharapkan memberikan pernyataan sikapnya secara tegas dengan mengambil langkah “simbiosis mutualisme”, yaitu agar tidak ada negara yang merasa dikecewakan oleh pernyataan sikap Indonesia tersebut.

## **2. Konsep Kepentingan Nasional**

Sasaran politik luar negeri yang pada hakekatnya ialah: mewakili, menegakkan, membela, memperjuangkan dan memenuhi kepentingan nasional dalam forum hubungan internasional, yang tidak lain adalah forum interaksi masyarakat internasional. Dengan demikian kepentingan nasional merupakan prinsip yang fundamental dalam kerangka politik luar negeri, sehingga pembicaraan mengenai sasaran politik luar negeri harus didahului dengan penjelasan mengenai pengertian kepentingan nasional.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Dr. Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta IKAPI, cet. Pertama, 1987, hal. 35

Konsep kepentingan nasional dipergunakan karena memiliki sejumlah kemampuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan ataupun meramalkan perilaku internasional suatu Negara. Dengan kata lain dasar perilaku luar negeri suatu Negara dapat diketahui melalui kepentingan Negara tersebut dan sebagai bahan acuan untuk menganalisa konsep kepentingan nasional suatu negara, seperti yang telah diutarakan Paul Seabury bahwa: "ide kepentingan nasional mengacu pada sejumlah perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan nasional suatu bangsa, yang harus ditemukan sebagai dasar pelaksanaan hubungan luar negeri negara tersebut. Dalam hal ini, kata normative dapat digunakan. Sedangkan kepentingan nasional yang lebih mengacu kepada hal yang lebih deskriptif (real) adalah sejumlah tujuan nasional suatu bangsa yang akan diraih dalam jangka waktu tertentu."<sup>24</sup>

Tentang konsep ini, Jack C. Plano dan Roy Olton dalam *international Relation Dictionary*, menjelaskan bahwa kepentingan nasional adalah kepentingan-kepentingan untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keamanan, militer dan ekonomi.<sup>25</sup> Sedangkan kepentingan nasional itu sendiri menurut Morgenthau didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian Negara-bangsa.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Paul Seabury dalam K.j Holsty, *Internasional Politic A Framework for Analysis*, prestice Hall of India, New Delhi, 1078, hal 139

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> Mohtar Masoe'd, *Ilmu Hubungan Internasional (Disiplin dan metodologi)*. LPE3S Jakarta, 1990, hal 18.

Dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri, suatu Negara senantiasa mendasarkan pada kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Menurut Donal E. Nuckertlein, kepentingan nasional adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara-negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.<sup>27</sup> Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri sebagai manifestasi atas sikapnya.

Bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki sejumlah kebutuhan dan tujuan yang sebagian besar yang dapat diperoleh melalui pengadaan hubungan serta penyebaran pengaruh terhadap Negara lain. Hubungan luar negeri tersebut ditujukan untuk memecahkan berbagai persoalan baik yang berhubungan dengan masalah dalam negeri maupun luar negeri. Seperti yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 tujuan politik luar negeri Indonesia perwujudan dari tujuan negara, yaitu: "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social".

Adapun dalam sila pancasila yaitu sila kedua dan kelima, mewajibkan Indonesia untuk ikut memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia. Sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1988, politik luar negeri bebas aktif diusahakan untuk meningkatkan peranannya dalam memberikan

---

<sup>27</sup> Donald E. Nuchterlein, "The Concept of National Interest: A Time For New Approach", *Orbis*, Vol.23, No.1, 1979, hal 75.



sumbangan terciptanya perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera, terutama diabdikan dalam kepentingan nasional. Adapun kepentingan nasional Indonesia diidentifikasi dengan kesejahteraan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Suriah merupakan Negara penyerap tenaga kerja Indonesia sehingga mampu mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

### 3. Teori Orientasi Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan : tindakan atau gagasan, yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan – yaitu, dalam kebijakan, sikap, atau tindakan Negara lain.<sup>28</sup>

Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai bidang isu internasional paling sedikit merupakan suatu ungkapan orientasi umumnya terhadap bagian dunia lain. Yang dimaksud orientasi di sini ialah: sikap dan komitmen umum suatu Negara terhadap lingkungan eksternal dan strategi fundamentalnya untuk mencapai tujuan dalam dan luar negerinya dan untuk menanggulangi ancaman yang berkesinambungan. Strategi atau orientasi umum suatu bangsa jarang diungkapkan dalam suatu keputusan, tetapi merupakan hasil dari serangkaian keputusan kumulatif yang diambil dalam upaya untuk menyesuaikan tujuan, nilai, dan kepentingan dengan kondisi dan karakteristik lingkungan domestic dan eksternal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> K. J. Holsti, *Politik Internasional, Sebuah Kerangka Untuk Analysis*. Jakarta; Penerbit Erlangga, Alih bahasa M. Tahir Azhary, Edisi ke empat jilid 1. 1988, hal. 107

<sup>29</sup> Ibid, 108

Orientasi kebijakan luar negeri mencakup tiga hal:

1. Isolasi

Orientasi para isolasionis (mereka yang suka memencilkan negerinya dari dunia luar) sering didasarkan pada asumsi bahwa Negara dapat mencapai keamanan dan kemerdekaan dengan mengurangi transaksi dengan unit politik dalam system itu, atau dengan memelihara hubungan diplomatic dan perdagangan luar negeri, sambil menangani semua ancaman yang dirasakan atau ancaman potensial dengan membentuk 'tembok' administrasi disekitar basis dalam negeri. Menurut logika, suatu orientasi ilusionis akan diterapkan atau dapat berhasil, paling sedikit hanya dalam suatu system dengan struktur kekuasaan yang tersebar secara layak, di mana ancaman militer, ekonomi atau ideology tidak mungkin ada, atau di mana Negara-negara regular menggeser persekutuan. Unit politik yang menerapkan orientasi isolasi biasanya dapat memenuhi kebutuhan sendiri secara ekonomis dan social. Untuk dapat mempertahankan "cara hidup" termasuk nilai social, struktur politik dan pola ekonomi, suatu unit politik tidak wajib mengubah lingkungan luarnya demi kepentingannya. Orientasi isolasi dapat dikaitkan secara langsung dengan kehadiran ancaman yang dirasakan, apakah ancaman itu secara militer, ekonomi atau cultural. Namun kebanyakan unit politik

menerapkan setrategi isolasi sebagai suatu cara menanggulangi ancaman actual atau potensial.

## 2. Non blok

Netralitas, netralisme dan non blok, dalam satu hal, ketiga istilah ini berarti tipe orientasi kebijakan luar negeri yang sama, di mana suatu Negara tidak melibatkan kemampuan militer dan kadang-kadang dukungan diplomatiknya terhadap tujuan-tujuan Negara lain adalah bukti resmi bahwa nonblok sebagai suatu strategi kebijakan luar negeri, tetapi ada beberapa variasi dalam beberapa keadaan yang mendorong suatu Negara menerapkan kebijakan nonblok ; di sinilah netralitas dan netralisme mempunyai makna yang berbeda.

Netralitas mengacu pada status hukum suatu Negara selama permusuhan senjata. Di bawah hukum netralitas internasional, Negara yang tidak berperang (nonbelligerent) selama masa perang memiliki sejumlah hak dan kewajiban tertentu yang tidak diberikan pada yang berperang. Aturan ini misalnya mengatakan bahwa suatu Negara netral boleh tidak mengizinkan penggunaan wilayahnya sebagai basis operasi militer oleh salah satu Negara yang berperang, tidak boleh menyediakan bantuan militer kepada pihak yang berperang, boleh menggunakan jalur bebas di laut terbuka untuk mengangkut barang-barang non militer dan dalam keadaan tertentu menembus blockade Negara-negara yang berperang.

Negara netral harus menahan diri dari pembentukan aliansi militer dengan Negara lain. Perbedaan antara Negara netral dengan Negara nonblok ialah bahwa Negara netral memperoleh kedudukannya berdasarkan tindakan Negara lain. Sementara Negara nonblok memilih orientasinya sendiri dan tidak ada jaminan bahwa posisinya akan dihormati Negara lain.<sup>30</sup>

Bentuk nonblok yang paling umum dewasa ini yang sering dijumpai di antara Negara-negara yang atas prakarsa sendiri dan tanpa jaminan Negara lain menolak mengikat diri secara militer dengan kepentingan dan tujuan Negara-negara besar. Meskipun Negara nonblok itu memberikan dukungan diplomatiknya kepada blok atau pemimpin blok mengenai isu-isu tertentu namun mereka menahan diri untuk tidak memihak secara diplomatic pada suatu blok mengenai semua isu. Peran mereka adalah independen dalam system sebagai suatu keseluruhan meskipun dalam wilayah-wilayah tertentu mungkin secara militer, ideologis, dan ekonomi mereka bersekutu.

Orientasi nonblok dapat dikaitkan dengan sejumlah pertimbangan dan tekanan dalam negeri.<sup>31</sup>

### 3. Pembentukan koalisi dan aliansi

Pemerintah yang berusaha membangun koalisi diplomatic atau aliansi militer yang permanen mengasumsikan bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka, mempertahankan kepentingan mereka, atau

---

<sup>30</sup> Ibid 112

<sup>31</sup> Ibid 114

mengahurangi ancaman yang dirasakan dengan memobilisasikan kemampuan mereka sendiri. Jadi mereka mengandalkan, dan membuat komitmen dengan negara lain yang juga menghadapi masalah luar negeri yang sama, atau secara bersama mereka mencapai tujuan itu.<sup>32</sup>

Dalam konteks ini, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap suriah cenderung bersifat netral. Indonesia tidak melakukan koalisi ataupun aliansi. Netral di sini dalam artian, Indonesia tidak melibatkan diri dalam urusan internal suriah. Indonesia tidak seperti sekutu Suriah yang membela mati-matian Suriah dengan menolak resolusi yang telah dikeluarkan PBB, Indonesia juga tidak mendukung pihak oposisi sebagaimana Amerika, Liga Arab dan Negara-nagar Eropa yang setuju terhadap penggulingan rezim.

Indonesia turut serta memberikan dukungan terhadap upaya-upaya perdamaian Suriah dan menghendaki agar kekerasan yang terjadi di Suriah segera dihentikan. Dukungan tersebut dijalankan melalui dewan PBB dengan turut serta aktif dalam perdamaian dunia, Indonesia mengirimkan tim pasukan pemantau ke Suriah, menghendaki agar adanya dialog. Indonesia mendorong Negara-negara lain untuk turut serta sebagai solusi terhadap konflik yang terjadi di Suriah. Indonesia juga memberikan dukungan sepenuhnya terhadap enam poin rencana damai yang diusung Koffie Annan, yang di dalamnya berisi pelucutan senjata, dan gecatan senjata selamanya.

---

<sup>32</sup> Ibid. hal 117

Tentunya dalam menjalankan kebijakan luar negerinya tersebut, Indonesia berpedoman pada dasar hukum yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu: ..“ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”. Sehingga jelas bahwa Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya sesuai dengan apa yang diamanatkan UUD 45. Indonesia dituntut untuk secara aktif ikut serta menentang terjadinya segala bentuk kekerasan yang berwujud pada ketidakadilan.

#### **D. Hipotesa**

Dari latar belakang permasalahan dan kerangka dasar teori yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan hipotesa, yaitu: Indonesia bersikap netral terhadap konflik yang terjadi di Suriah. Tidak memihak oposisi maupun rezim pemerintah Suriah.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dan regulasi dalam memformat etika penelitian. Ada beberapa bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah metode penelitian yang sekiranya penting untuk dituangkan dalam sebuah karya, khususnya pada karya ini, diantaranya:

##### **1. Jenis penelitian**

Secara garis besar dalam ilmu sosial penelitian dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu (1) dari aplikasinya, terbagi dalam penelitian murni dan penelitian lapangan. (2) dari tujuan yang akan dicapai, terbagi dalam

penelitian deskriptif, penelitian korelatif dan penelitian eksplanatif, serta penelitian eksploratif.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu subyek, suatu kondisi, suatu system, suatu pemikiran atau kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki,<sup>34</sup> oleh karena itu penulisan karya tulis ini bersifat literer.

## **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku yang diterbitkan, sementara sumber data sekunder diperoleh dari majalah, internet, dokumen resmi dan lain-lain.

## **3. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Disini penulis lebih banyak bertumpu pada studi dokumen dari data yang diperoleh seperti yang sudah disebut dalam poin dua di atas yaitu, sumber data berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan objek yang dikaji dalam tulisan ini. Data primer adalah data pokok yang dijadikan penulis, dan data sekunder merupakan data pendukung dalam pembahasan.

---

<sup>33</sup> Muhammad Zaenuri, *Metode Penelitian Sosial* (I). Yogyakarta. FISIP UMY. 1999. Hal. 6

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia, 1998. Hal. 63

#### **4. Teknik analisis data**

Disesuaikan dengan jenis penelitian yang digunakan, yakni jenis penelitian deskriptif, maka penulisan data yang dipakai adalah analisa kualitatif, yaitu: menganalisis data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan melainkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data.<sup>35</sup>

Analisa data merupakan merupakan merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Langkah-langkahnya diawali dengan membaca dan penelaahan terhadap berbagai sumber data yang terkait baik sumber primer atau sekunder yang ada kaitannya dengan masalah yang tengah dikaji. Selanjutnya mengidentifikasi aspek-aspek penting, memfokuskan pengumpulan data, sampel dan metode sampai pada kesimpulan dengan berupa abstraksi.

Tahapan berikutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan dalam tema-tema yang lebih spesifik dengan keabsahan data yang terjaga. Terakhir, adalah dengan melakukan penafsiran atau interpretasi atas teks sebagai bentuk analisa sampai penarikan kesimpulan sesuai dengan pertanyaan dalam penelitian.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis, maka diperlukan pembatasan dalam penulisan ini. Penelitian ini akan memfokuskan pada sikap Indonesia terhadap konflik revolusi di Suriah yang terjadi sejak pertengahan 2011 sampai 2012.

---

<sup>35</sup> Masri *cop cit*, hal. 21



## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam membuat karya ilmiah ini, sistematika perlu dilakukan agar lebih sistematis Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas serta memudahkan dalam menelusuri poin penting pemikiran dan analisa. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Menjelaskan mengenai politik luar negeri Indonesia; Mengurai Hubungan bilateral Indonesia – Suriah; (bidang politik, perdagangan, infrastruktur, TKI pertukaran pelajar)

Bab III : mengenai gambaran umum Negara Suriah; Menjelaskan tentang konflik revolusi di Suriah 2011-2012, yang mencakup: Pecahnya revolusi di Suriah;

Bab IV : Mengurai pemaknaan Indonesia dan netralitasnya terhadap konflik revolusi di Suriah yang terjadi pada pertengahan 2011-2012 di masa pemerintahan Presiden Bashar al Assaad.

Bab V. : Berisi kesimpulan dari hasil penelitian.